

Peradaban Islam Di Nusantara Pasca Kemerdekaan Dan Perkembangan Pendidikannya

Nilna Nailal Fariyah¹, Iskanatul Khoiroh Al Muhimmah¹, Nauval Arief Rizky¹,
M.Anang Sholikhudin¹

¹ Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Yudharta Pasuruan
e-mail: nilnanaila005@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the development of Islamic education in Indonesia after independence, focusing on the system and curriculum. The background of this study is based on the importance of Islamic education as an integral part of the national education system that helps shape the character and spiritual values of students. The main problem in this study is how the Islamic education system and curriculum developed in Indonesia after independence and what implications national education policy has for the substance and teaching methods of Islamic education at various levels of formal education. The purpose of the study is to determine the direction of policy, curriculum dynamics, and the contribution of Islamic educational institutions to the national education system. This study uses a literature review method with a descriptive qualitative approach. The results show that Islamic education has experienced significant development since independence, starting from formal recognition in the national education system to curriculum refinement that integrates Islamic and general sciences. The 2013 Curriculum and the Merdeka Curriculum are important milestones in strengthening Islamic education relevant to the needs of the 21st century. Suggestions put forward include the importance of strengthening teacher capacity, curriculum innovation based on Islamic values and local wisdom, and the development of integrated learning models that encourage collaboration between the spiritual and intellectual aspects of students. (Fuadi, 2025).

Keywords: *Islamic Education, Curriculum, Post-Independence*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan pendidikan Islam di Indonesia pasca kemerdekaan dengan fokus pada sistem dan kurikulum. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada pentingnya pendidikan Islam sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional yang turut membentuk karakter dan nilai spiritual peserta didik. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana perkembangan sistem dan kurikulum pendidikan Islam di Indonesia pasca kemerdekaan dan apa implikasi kebijakan pendidikan nasional terhadap substansi dan metode pembelajaran pendidikan Islam di berbagai jenjang pendidikan formal. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui arah kebijakan, dinamika kurikulum, dan kontribusi lembaga pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional. Penelitian ini menggunakan metode kajian literatur dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan Islam mengalami perkembangan signifikan sejak kemerdekaan, mulai dari pengakuan formal dalam sistem pendidikan nasional hingga penyempurnaan kurikulum yang mengintegrasikan antara ilmu keislaman dan ilmu umum. Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka menjadi tonggak penting dalam penguatan pendidikan Islam yang relevan dengan kebutuhan abad ke-21. Saran yang diajukan adalah pentingnya penguatan kapasitas guru, inovasi kurikulum berbasis nilai Islam dan kearifan lokal, serta pengembangan model pembelajaran terpadu yang mendorong kolaborasi antara aspek spiritual dan intelektual peserta didik.

Kata kunci: *Pendidikan Islam, Kurikulum, Pasca Kemerdekaan*

1. PENDAHULUAN

Teori terkait permulaan Islam masuk ke wilayah Indonesia masih terjadi banyak perdebatan. Terdapat beragam teori dari para ahli yang menjelaskan terkait waktu dan bangsa yang pertama kali membawa agama Islam masuk ke Indonesia dengan berbagai bukti yang ditemukan. Namun, berdasarkan teori-teori yang ada, Sunyoto mengemukakan bahwa setidaknya perkembangan Islam di Indonesia melalui 3 fase. Fase pertama adalah periode abad ke-7 hingga 10 Masehi. Fase ini merupakan perkiraan waktu kedatangan bangsa luar yang beragama Islam masuk ke wilayah Indonesia. Fase ini juga memungkinkan komunitas muslim sudah terbentuk, terutama pada wilayah pesisir. Fase kedua adalah periode abad ke-11 hingga 13 Masehi. Perkembangan Islam sudah lebih jauh dan dapat dipastikan

telah menyebar hingga ke pulau Jawa. Hal ini ditandai dengan ditemukannya makam seseorang bernama Fatimah Binti Maimun yang wafat pada 1082 Masehi di Gresik, Jawa Timur. Fase terakhir adalah perkembangan Islam dalam bentuk berdirinya berbagai kerajaan Islam yang tersebar mulai dari wilayah barat hingga timur Indonesia. Fase ini dimulai pada abad ke-13 dengan berdirinya kerajaan Samudra Pasai yang merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia (Amalia et al., 2025).

Pendidikan Islam memiliki peran sentral dalam membentuk keislaman masyarakat Nusantara sejak masa awal masuknya Islam. Pendidikan Islam di Nusantara memiliki akar sejarah yang panjang dan mendalam, dimulai dari tradisi pengajian di masjid sebagai bentuk awal penyebaran ilmu-ilmu keislaman. Masjid bukan hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga pusat pembelajaran yang membentuk fondasi awal sistem pendidikan Islam. Seiring waktu, sistem pengajaran ini berkembang dan melahirkan institusi-institusi formal seperti surau, pesantren, madrasah, dan Universitas Islam Negeri yang tidak hanya berperan sebagai pusat transmisi ilmu-ilmu agama, tetapi juga sebagai lembaga yang membentuk karakter, moralitas, dan identitas keislaman masyarakat Nusantara. Dalam konsep Pendidikan Agama Islam pada dasarnya segala sesuatu yang kita hasilkan merupakan hasil usaha dari kita dan ketetapan dari Allah Swt, sebagaimana Allah SWT berfirman: Dalam surah At-Taubah[9]: 105.

Artinya: Dan katakanlah, "Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan." (Q. S At-Taubah [9]: 105). (Yustisia & Komariah, 2025).

Pada tanggal 17 Agustus 1945, proklamasi Indonesia adalah momen awal dari pembentukan pemerintahan Indonesia. Proklamasi ini adalah peristiwa bersejarah yang sangat penting bagi Indonesia sebagai negara merdeka. Sebagai negara yang telah mencapai kemerdekaan, Indonesia memiliki tanggung jawab untuk membentuk sistem pemerintahan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam upaya ini, salah satu aspek yang sangat penting adalah penyelenggaraan pendidikan untuk seluruh rakyat. Setelah merdeka, Indonesia melakukan berbagai perubahan dalam berbagai sektor, termasuk bidang pendidikan. Perubahan dalam pendidikan menjadi landasan dan aspirasi utama dari bangsa yang telah merdeka (Nilawati & Achruh, 2023).

Perkembangan Islam di Indonesia pasca kemerdekaan tidak lepas dari tantangan yang dihadapi, baik dari dalam maupun luar. Dalam konteks global, munculnya berbagai gerakan Islam di negara-negara lain juga mempengaruhi dinamika Islam di Indonesia. Selain itu, pergeseran nilai-nilai sosial dan budaya akibat modernisasi dan globalisasi turut memberikan dampak terhadap praktik dan pemahaman agama di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan agama Islam di Indonesia serta implikasinya terhadap kehidupan masyarakat (Susilawati & Kurnia, 2024).

Bidang pendidikan yang masih terus dapat dinikmati adalah pesantren. Berdasarkan data dari Kementerian Agama Republik Indonesia tahun ajaran 2023/2024 semester ganjil, jumlah pesantren di Indonesia mencapai 39.551 dengan jumlah santri sebanyak 4.9 juta. Sementara itu, di bidang politik, partai-partai politik Muslim masih terus eksis hingga saat ini. Begitu pun dengan organisasi-organisasi besar Muslim yang dibentuk pada masa penjajahan, seperti NU, Muhammadiyah, dan lain-lain yang masih tetap aktif hingga hari ini. (Amalia et al., 2025)

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode tinjauan pustaka dan proses tahapan kerjanya meliputi merupakan proses pengumpulan sumber-sumber data untuk kajian pendidikan setelah kemerdekaan, adapun isi dari penelitian ini tentang perkembangan pendidikan Islam setelah kemerdekaan dimana agar sistem pendidikan pesantren dan madrasah agar bisa menghasilkan tenaga kerja yang trampil yang siap terjun di dunia kerja. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi dan telaah pustaka. Peneliti mengidentifikasi dan mengumpulkan berbagai dokumen pendidikan melalui penelusuran katalog perpustakaan nasional dan universitas, e-journal, dan portal resmi seperti kemdikbud.go.id dan kemenag.go.id. Instrumen utama dalam proses ini adalah coding sheet dan checklist analisis dokumen yang disusun berdasarkan kategori tematik seperti "sistem pendidikan Islam pasca kemerdekaan", "kurikulum berbasis nilai Islam", "kebijakan pendidikan nasional", dan "sinkronisasi antara pendidikan agama dan pendidikan umum". Dokumen-dokumen tersebut kemudian

diseleksi dan diklasifikasi berdasarkan periode waktu, jenis kebijakan, serta tingkat pengaruhnya terhadap pendidikan Islam di Indonesia (Fuadi, 2025)

Setelah itu, memastikan bahwa informasi yang digunakan dalam penelitian relevan dengan tujuan penelitian dan berasal dari sumber yang terpercaya. Langkah selanjutnya adalah analisis data. Pada tahap ini, data yang telah digabungkan akan dianalisis secara objektif dengan pendekatan literatur. Peneliti tidak hanya mendeskripsikan isi dokumen, tetapi juga menginterpretasikan makna yang terkandung di dalamnya, menghubungkan berbagai referensi, dan menemukan pola atau hubungan yang mendukung argumen penelitian (Yustisia & Komariah, 2025). Tahap terakhir adalah penulisan hasil penelitian (Volume et al., 2015)

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Sejarah perkembangan Pendidikan pada masa kolonial

Perkembangan Islam di Indonesia pada masa kolonial memiliki dinamika yang kompleks, dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, politik, dan ekonomi. Sejak kedatangan bangsa Eropa, khususnya Belanda, pada abad ke-17, Islam menghadapi tantangan yang signifikan. Meskipun demikian, agama ini tetap berkembang, terutama di kalangan masyarakat lokal. Menurut penelitian oleh Azra (2006), pada abad ke-19, jumlah umat Islam di Indonesia diperkirakan mencapai 90% dari populasi, menunjukkan bahwa Islam telah menjadi agama dominan di wilayah ini. Selama masa kolonial, pemerintah Belanda menerapkan kebijakan yang cenderung diskriminatif terhadap umat Islam. Mereka membatasi pendidikan agama dan mendukung pendidikan Barat yang lebih sekuler. Namun, kebijakan ini justru memicu reaksi dari kalangan ulama dan aktivis Islam, yang mulai mendirikan sekolah-sekolah Islam dan organisasi keagamaan. Salah satu contoh signifikan adalah berdirinya Nahdlatul Ulama (NU) pada tahun 1926, yang berfokus pada pembelajaran agama dan sosial (Susilawati & Kurnia, 2024).

Indonesia yang kaya akan rempah-rempah juga menjadi daya tarik bagi bangsa Barat. Bangsa Eropa pertama yang masuk ke wilayah Nusantara adalah Portugis. Portugis dengan kemajuannya dalam bidang Maritim memiliki motivasi yang kuat untuk mencapai daerah penghasil rempah-rempah dengan jalur perdagangan Asia. Hal ini dilakukan untuk memotong jalur perdagangan yang selama ini dikuasai oleh pedagang Muslim (Ricklefs dalam Burhanuddin, 2017). Bangsa Barat juga memiliki tujuan untuk menaklukkan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia (Amalia et al., 2025). Selain itu juga ada pada masa jepang yakni Perilaku bangsa Jepang dalam menghadapi umat Muslim di Indonesia jauh berbeda dengan kolonial Belanda. Pendudukan Jepang cenderung memberi jalan bagi Bangsa Indonesia memperjuangkan kemerdekaan. Oleh karena itu, jika di masa pendudukan Belanda, perlawanan dilakukan dalam bentuk perang dari berbagai daerah, maka di masa pendudukan Jepang, para kaum nasionalis melakukan kerja sama dengan Jepang. Kerja sama yang dilakukan merupakan kerja sama politik untuk merebut Kemerdekaan (Amalia et al., 2025). Pada tahun 1944, Jepang kemudian menjanjikan kemerdekaan untuk Indonesia yang direspon positif oleh kaum nasionalis. Setelah janji tersebut, tokoh nasionalis muslim pun terus menerus mendesak Jepang untuk mewujudkan janji kemerdekaan. Hal ini akhirnya terwujud dengan dilakukannya persiapan untuk Kemerdekaan Indonesia, seperti dengan pembentukan BPUPKI, PPKI, dan perumusan dasar negara. Para tokoh muslim pun secara aktif terlibat dalam merancang dasar negara (Murdi & Hadi, 2018) (Amalia et al., 2025).

Memasuki era kolonial, Indonesia dikepung dengan kebijakan pendidikan yang diterapkan oleh Belanda. Banyak sekolah didirikan dan hanya boleh dinikmati oleh kaum priyayi dan konglomerat dari pihak Belanda atau sekutu mereka. Sementara orang pribumi jarang bahkan cenderung tidak ada yang mendapatkan hak bersekolah. Tujuan Belanda membangun sekolah untuk pribumi semata-mata agar masyarakat Indonesia patuh terhadap kebijakan oleh kolonial dan diharapkan bekerjasama dengan bangsa Eropa. Rata-rata yang dapat bersekolah di sana adalah anak bupati, sementara jurusan yang tersedia ialah administrasi. Proyek ini terus berlanjut hingga sekolah ini memiliki lembaga pendidikan kelas satu dan kelas dua di tahun 1893 (Musadad, 2021).

3.2. Pendidikan Islam Masa Orde Lama

Pada awal kemerdekaan, pemerintah Indonesia telah mewarisi sistem pendidikan dan pengajaran yang dualistis, yaitu sistem pendidikan dan pengajaran di sekolah umum yang sekuler tak mengenal agama warisan dari pemerintah Belanda yang hanya dinikmati kalangan atas saja dan sistem

pendidikan dan pengajaran yang tumbuh dan berkembang di kalangan masyarakat Islam sendiri dengan berbagai variasi pola pendidikannya yang berurat akar serta dinikmati kalangan bawah (Purwanto, 2022).

Perjalanan sejarah pendidikan Islam sejak Indonesia merdeka sampai tahun 1965 yang lebih dikenal dengan masa orde lama. Tindakan pertama yang diambil oleh pemerintah Indonesia, ia menyesuaikan pendidikan dengan tuntunan dan aspirasi rakyat sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 Pasal 31 yang berbunyi : 1) Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran; 2) Pemerintah mengusahakan suatu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang. Oleh sebab itu, pembatasan pemberian pendidikan disebabkan perbedaan agama, sosial, ekonomi dan golongan yang ada di masyarakat tidak dikenal lagi. Dengan demikian, setiap anak Indonesia dapat memilih kemana dia akan belajar, sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya (Nilawati & Achruh, 2023)

Pada periode ini kegiatan pendidikan di Indonesia lebih mengarah pada penataan nilai-nilai nasionalisme, identitas bangsa, dan pembangunan pondasi ideologis kehidupan berbangsa dan bernegara. Tujuan utama pendidikan pada periode ini adalah nation and character building. Kalangan utama penyelenggaraan pendidikan nasional diampu oleh sejumlah tokoh dari kalangan nasionalis. Mereka menguasai berbagai posisi penting di institusi pemerintahan dan secara aktif, dan sistematis menjadikan pendidikan sebagai bagian integral dari proses sosialisasi ideologi negara serta penataan corak kehidupan berbangsa dan bernegara (Musadad, 2021).

Pada akhir Orde Lama, yang ditandai dengan dibubarkannya PKI, peserta pertarungan ideologis menjadi berkurang. Bahkan menyusul setelah itu keluar TAP MPRS XXVII yang mewajibkan pendidikan agama di semua tingkat pendidikan. Lebih dari itu, dalam lampirannya diisyaratkan perlunya perhatian dan yang lebih wajar terhadap pendidikan Islam termasuk pesantren. Dengan demikian, secara teknis persaingan di bidang pendidikan ini relatif bertambah ringan. Tugas utama Departemen Agama seperti diungkap pada alinea sebelumnya adalah mengamankan program pendidikan secara umum sesuai yang digariskan pemerintah (Purwanto, 2022). Periode Kolonial Belanda (abad ke-19 – pertengahan abad ke-20) Pendidikan Islam mengalami tekanan karena Belanda menerapkan kebijakan diskriminatif. Namun, pesantren tetap bertahan sebagai simbol perlawanan budaya dan agama. Muncul pula pembaharuan dengan berdirinya lembaga modern seperti Muhammadiyah (1912), Nahdlatul Ulama (1926), dan Persis (1923). (Yustisia & Komariah, 2025).

3.3. Pendidikan islam masa orde baru

Pada masa awal Orde Baru, pemerintah berhasil mengalihkan perhatian terhadap bidang pendidikan dari perdebatan konsep yang bersifat ideologis politis kepada orientasi praktis. Pendidikan waktu itu diletakkan sebagai bagian dari strategi kebudayaan, di mana pendidikan dijadikan alat membentuk manusia modern yang independen dari kekuasaan kerabat dan etniknya serta bersikap mencintai ilmu dan teknologi. Pendidikan dalam kerangka ini disetting untuk menghasilkan man power yang dapat menggerakkan dan menjamin laju industri yang menjadi program pemerintah. Dari sini, dapat dipahami keluarnya SKB tiga menteri tahun 1975. SKB Tiga Menteri Tahun 1975 merupakan keputusan bersama Tiga Menteri,

yaitu Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, serta Menteri Dalam Negeri, nomor: 6 tahun 1975, Nomer: 037/U/1975, dan Nomor: 36 Tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan Pada Madrasah. SKB ini berhasil menjaga eksistensi pesantren/madrasah dengan memasukkannya ke dalam sistem pendidikan nasional, memberinya ruang mobilitas terhadap lulusan-lulusannya. Namun di sisi lain, kebijakan pemerintah Orde Baru yang dituangkan dalam SKB Tiga

Menteri tersebut banyak dipermasalahkan oleh sebagian besar umat Islam, terutama ulamanya. Karena SKB Tiga Menteri itu dianggap membuat siswa madrasah serba tanggung, tidak mengerti dengan baik pengetahuan agama dan juga umum, sehingga akan mengakibatkan kelangkaan ulama. Untuk mencari solusinya untuk Departemen Agama pada tahun 1987, dimasa Menteri Munawir Sjadzali, mendirikan Madrasah Aliyah Program Khusus (MAPK). Madrasah ini diharapkan menjadi lembaga mencetak calon ulama yang mengerti agama dengan baik juga pengetahuan umum utamanya bahasa Arab dan Inggris. Namun sayangnya MAPK/MAK ini tidak mempunyai payung hukum, karena madrasah yang diakui berdasarkan SKB Tiga Mentri itu adalah 70% pelajaran umum dan 30% pelajaran agama. Bahkan madrasah ini juga belum jelas posisinya dalam undang-undang Sisdiknas Nomor 2 tahun 1989. MAPK/MAK termasuk di dalam pendidikan keagamaan, baru mendapatkan tempat dalam Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 tahun 2003 (Purwanto, 2022).

SKB tersebut dapat menjelaskan kepada masyarakat bahwa pendidikan agama (Islam) bagi anak didik telah dirancang sedemikian rupa dan mengacu kepada UU. No. 4 tahun 1950. Hal ini juga menunjukkan bahwa telah ada upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam menjamin kehidupan beragama warganya, untuk mendapatkan pendidikan agamanya sesuai dengan kepercayaan yang dianut oleh setiap individu atau kelompok di Negara Republik Indonesia. Tidak luput pula bagi umat Islam bisa memperoleh pendidikan agama Islam di bangku sekolah mereka. Adapun kebijakan lain yang dibuat oleh pemerintah Orde Lama dalam hubungannya dengan politik pendidikan Islam ialah berdasar keputusan yang dirumuskan pada 1951, tugas Japenda (Jawatan Pendidikan Agama) dibagi ke dalam tiga bagian, yaitu bagian pendidikan agama di sekolah negeri, bagian pendidikan umum di madrasah, dan bagian pelatihan guru serta petugas agama (Musadad, 2021). Pendidikan Islam mulai diintegrasikan dalam sistem pendidikan nasional. Pemerintah mendirikan sekolah Islam formal seperti Madrasah, dan pendidikan agama masuk dalam kurikulum nasional (Yustisia & Komariah, 2025).

Apabila mencermati keadaan pendidikan di Indonesia, sebenarnya telah banyak dilakukan pembaharuan, dan tujuan dari perubahan-perubahan yang pada akhirnya untuk menjaga produk pendidikan yang lebih relevan dengan kebutuhan dunia kerja atau persyaratan bagi yang hendak melanjutkan pendidikan pada tingkat lebih tinggi. Tetapi sampai kini, pendidikan nasional masih terperangkap di dalam sistem kehidupan yang kooperatif, sehingga telah terkungkung di dalam paradigma-paradigma yang t memperlakukan rakyat belaka.²¹ Hal ini pernah terjadi terutama pada era Orde Baru yang telah berjalan dalam kurun waktu 32 tahun. Pada masa ini pendidikan Indonesia dinilai sangat tidak mampu memperdayakan masyarakat secara efektif, meskipun secara kuantitatif pada rezim ini mampu menunjukkan prestasi yang dinilai cukup baik dalam bidang pendidikan, hal ini diprakarsai oleh banyaknya bangunan dan jumlah sekolah yang berdiri, nilai kuantitatif ini bersifat banyak sejumlah gedung sekolah yang didirikan oleh rezim ini. Ketika secara kuantitatif ini bahwa pendidikan mengalami kemajuan naas justru masyarakat yang mampu menyerap sebagai sumberdaya tidak terlihat sama sekali.²² Mengapa hal itu bisa terjadi, diketahui bahwa ketika pemerintahan ini telah berjalan selama 5 tahun, secara sistematis telah mempersiapkan skenario pemerintahan yang memiliki visi dan misi yaitu melestarikan kekuasaan dengan berbagai cara dan metode. Akibatnya sistem pendidikan kemudian dijadikan sebagai safety net pelestarian kekuasaan itu melahirkan kebijakan yang bersifat straight jacket dan inilah kemudian yang mengakibatkan adanya kesenjangan pendidikan pada era Orde Baru. Bila dicermati maka ada 4 tahapan yang dilakukan oleh Orde Baru dalam memperpanjang periode kekuasaannya, dan berikut diantaranya: Pertama, sistem yang kaku dan sentralistik artinya suatu sistem yang terperangkap dalam satu kekuasaan otoritas dengan memiliki ciri-ciri sentralisme yaitu birokrasi yang ketat, dan telah mewarnai penyelenggaraan sistem pendidikan nasional. Kedua, sistem pendidikan nasional di dalam pelaksanaannya telah dicemari oleh unsur-unsur korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ketiga, sistem pendidikan tidak berorientasi pada pemberdayaan masyarakat, sehingga tujuan pendidikan untuk mencerdaskan rakyat telah sirna dan diganti dengan praktik-praktik “memberatkan” rakyat untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas. Keempat, pada kenyataannya “sistem pendidikan sekarang belum mengantisipasi masa depan dan masyarakat madani, artinya belum mampu menyiapkan output yang sesuai dengan permintaan pasar, kurang memiliki kemampuan bersaing secara kompetitif dan outputnya hanya sekedar mengandalkan ijazah resmi dari bidang studi tertentu dari suatu pendidikan dengan kemampuan yang sangat terbatas oleh alumninya (Musadad, 2021).

3.4. Pendidikan Islam Pada Era Kemerdekaan

Lembaga Pendidikan Islam secara formal telah diintegrasikan kepada sekolah sejak tahun 1946, sejak dimulainya pelajaran agama pada sekolah umum. Pada akhirnya tercantum dalam Undang-Undang Dasar No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dengan adanya undang-undang tersebut, posisi pendidikan Islam sebagai bagian sistem pendidikan nasional semakin efektif dan efisien, baik pada lingkup lembaga pendidikan umum maupun bidang keagamaan. Ketika dilihat berdasarkan dari undang-undang tersebut bahwa perhatian pemerintah terhadap pendidikan agama Islam sudah relevan pada lembaga tersebut telah disetarakan dengan sekolah umum sehingga tidak ada lagi terdapat perbedaan antara lembaga yang satu dengan lembaga pendidikan Islam lainnya.

Salah satu bukti bahwa Pendidikan Islam sudah mendapat perhatian pemerintah, dapat dilihat dari pengaruh ide pembaharuan yang berkembang pada dunia Islam dan kebangkitan bangsa Indonesia, proses demi proses pelajaran umum masuk dalam kurikulum madrasah. (Nursyarief, 2014) Buku pelajaran agama Islam juga mulai disusun khusus sesuai dengan tingkatan madrasah. Selanjutnya ketika

keadaan tersebut berbeda ketika dengan politik pendidikan Islam pada masa Orde Baru yang dimulai tahun 1966. Pada mulanya umat Islam amat berharap kepada Pemerintahan Orde Baru agar memperhatikan segala bentuk nasib pendidikan Islam. (“Islam Pasca Orde Baru,” 2016) Namun, harapan tersebut yang juga belum terwujud sebagai akibat dari kebijakan politik Pemerintahan Orde Baru yang terkadang kurang sejalan dengan keinginan umat Islam pada kala itu (Fahmi, n.d.).

3.5. Perkembangan Pendidikan Islam di Indonesia Sejak Periode Pasca Kemerdekaan Hingga Masa Kini

Sejarah kehidupan Islam di Indonesia telah diakui sebagai kekuatan cultural, tetapi Islam dicegah untuk merumuskan bangsa Indonesia menurut versi Islam. Sebagai kekuatan moral dan budaya, Islam diakui keberadaannya, tetapi tidak pada kekuatan politik secara riil. Perkembangan selanjutnya pada masa Orde Lama, Islam telah diberi tempat tertentu dalam konfigurasi yang paradoks, terutama dalam dunia politik. Sedangkan Orde Baru, tampaknya Islam diakui sebatas sebagai landasan moral bagi pembangunan bangsa dan Negara. Pendiskriminasian Islam tersebut memang sudah diawali pada saat wajah (ideologi) Indonesia akan ditentukan sehingga muncullah berbagai gerakan- gerakan dan pertentangan-pertentangan Islam anti pemerintah akibat kekecewaan terhadap pembentukan Negara Pancasila sebagai dasar Negara Indonesia (Volume et al., 2015)

Pendidikan Islam di Nusantara merupakan proses panjang transformasi nilai-nilai keislaman yang tidak sekadar berlangsung sebagai aktivitas pengajaran formal, melainkan juga sebagai bentuk pembudayaan nilai dalam kehidupan masyarakat. Tidak hanya berfokus pada penguasaan ilmu pengetahuan agama secara kognitif, pendidikan Islam juga mengedepankan pembentukan karakter (afektif) dan keterampilan hidup (psikomotor), dengan tujuan akhir membentuk insan kamil yakni individu yang utuh secara spiritual, intelektual, dan sosial. Perjalanan pendidikan Islam di Nusantara menunjukkan dinamika yang progresif dan kontekstual. Pada fase awal, pendidikan diselenggarakan dalam bentuk nonformal, seperti halaqah (pengajian), surau, dan meunasah, di mana seorang ulama atau guru mengajarkan ilmu-ilmu dasar keislaman kepada masyarakat secara langsung (Yustisia & Komariah, 2025).

Dalam hal pelaksanaannya, Pendidikan dapat diselenggarakan melalui dua jalur, yaitu jalur pendidikan formal di sekolah dan jalur pendidikan non-formal di luar sekolah. Terkait dengan sumber daya manusia di bidang pendidikan, ini melibatkan berbagai pihak, termasuk pendidik, pengelola lembaga pendidikan, pemilik lembaga, pengawas, peneliti dan pengembang dalam bidang pendidikan, pustakawan, tenaga laboratorium, dan teknisi sumber belajar. Dalam hal kurikulum, kurikulum disusun dengan tujuan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional dengan memperhatikan perkembangan peserta didik dan kesesuaian dengan lingkungan Untuk Pendidikan agama, tujuannya adalah membentuk individu yang beriman dan bertakwa, dan dalam proses pendidikan agama, tata nilai keagamaan dipribadikan, sehingga akhlakul karimah bisa diintegrasikan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam konteks Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Nilawati & Achruh, 2023). Dan biasanya untuk Pendidikan agama adalah berbasis pesantren.

Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam paling awal di Nusantara. Jenis pendidikan dapat dijumpai di seluruh wilayah di Nusantara. Tidak heran pendidikan ini memiliki nama atau istilah lain dalam setiap daerah. Misalnya di Sumatera Barat pendidikan ini lebih dikenal dengan istilah “Surau”, di Aceh dinamakan dengan “Dayah atau Meunasah”. Sedangkan istilah pesantren lebih melekat kepada masyarakat di Pulau Jawa. Di samping di wilayah Indonesia, pendidikan tradisional ini juga dikenal di sejumlah wilayah Asia Tenggara lainnya, seperti Malaysia, Thailand. Namun dalam kedua negara tersebut lebih populer dengan nama pondok, yang mengakar pada suku kata bahasa Arab yakni Funduq yang memiliki arti tempat tidur, wisma, atau hotel sederhana (Musadad, 2021).

Inisiatif dan inovasi terbaru dalam pendidikan Islam, khususnya di Indonesia, menyoroti peran signifikan teknologi dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Perkembangan ini mencakup penggunaan berbagai platform online seperti Zoom meeting, Google Classroom, dan WhatsApp untuk menyampaikan materi, memantau kemajuan pembelajaran, dan mengevaluasi siswa. Tren masa depan dalam pendidikan Islam di Indonesia diperkirakan akan terus mengintegrasikan teknologi guna meningkatkan hasil pendidikan serta memfasilitasi lingkungan belajar yang lebih interaktif dan menarik (Hidayat et al., 2024).

Penggunaan teknologi dalam pendidikan Islam mencerminkan upaya untuk memperbaiki metode pembelajaran dan meningkatkan aksesibilitas pendidikan. Integrasi teknologi membuka peluang

baru untuk menyampaikan materi dengan cara yang lebih interaktif dan menarik, serta memungkinkan pengawasan dan evaluasi pembelajaran yang lebih efisien. Perkembangan pendidikan Islam di Indonesia sejak periode pasca kemerdekaan hingga masa kini telah menunjukkan progres yang positif dalam merespons tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Transformasi kebijakan pemerintah, universitas Islam, dan penggunaan teknologi adalah bukti nyata dari upaya untuk memperkuat basis pendidikan Islam dan meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan (Hidayat et al., 2024)

Setelah Indonesia meraih kemerdekaan pada tahun 1945, situasi sosial dan politik di negara ini mengalami perubahan yang signifikan. Perubahan ini tidak hanya berdampak pada struktur pemerintahan, tetapi juga pada dinamika kehidupan beragama, khususnya Islam. Dalam konteks ini, Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia memainkan peran penting dalam membentuk identitas nasional dan sosial masyarakat. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), sekitar 87% penduduk Indonesia beragama Islam, menjadikannya sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia (BPS, 2021). Kondisi sosial yang beragam di Indonesia, dengan berbagai suku dan budaya, menambah kompleksitas dalam pengembangan agama Islam. Pasca kemerdekaan, banyak organisasi Islam yang muncul, seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, yang berperan dalam pendidikan dan sosial. Organisasi-organisasi ini tidak hanya fokus pada aspek spiritual, tetapi juga berkontribusi dalam pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat. Misalnya, NU dan Muhammadiyah memiliki jaringan pendidikan yang luas, dengan ribuan sekolah dan universitas yang tersebar di seluruh Indonesia, yang membantu meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat Muslim (Susilawati & Kurnia, 2024).

3.6. Perkembangan Lembaga-lembaga pada masa kemerdekaan

Mula-mula memang ada tanda pemihakan terhadap pendidikan Islam, berkat pembaharuan di dalamnya yang menyandingkan bersama antara ilmu-ilmu umum dan agama. Soekarno yang tergolong nasionalis tetapi sering digambarkan agamis yang pada kemudian hari ternyata menjadi presiden pertama menunjukkan reaksi positifnya terhadap gagasan untuk memasukan sebanyak mungkin ilmu-ilmu umum ke dalam madrasah. (Hassan, 2012). Memilih sistem pendidikan Islam berarti memberikan pengakuan terhadap komunitas muslim dan secara psikologis meningkatkan martabatnya. Akan tetapi, pada saat yang bersamaan akan memberikan dampak psikologis yang negatif terhadap komunitas sekuler yang selama ini terbina dengan sekolah kolonial, padahal mereka relatif lebih terdidik dan terampil untuk menjalankan roda pemerintahan dan pengisian kemerdekaan. Berdirinya Departemen Agama sering digambarkan sebagai kompensasi bagi umat Islam untuk mengurangi kekecewaan menyusul kealahannya dalam pertempuran ideologis, termasuk termarginalkannya sistem pendidikan Islam (Azra, 2006).

Berkaitan dengan pendidikan Islam ini, tugas-tugas Departemen Agama meliputi; 1) Memberikan pengajaran agama di sekolah negeri dan particular (khususnya); 2) Memberi pengetahuan umum di madrasah; 3) Mengadakan pendidikan guru agama (PGA) dan Pendidikan Hakim Islam Negeri (PHIN). Dalam perkembangannya, Departemen Agama mengurus semua lembaga-lembaga pendidikan Islam, baik formal seperti madrasah hingga perguruan tinggi Islam maupun informal yang meliputi masjid, majlis ta'lim, pesantren, madrasah diniyah, TPA, TK, dan PTAI (Perguruan Tinggi Agama Islam). Jika dilihat dari latar belakang kelahirannya, keberadaan Departemen Agama (Kementerian Agama) berkaitan erat dengan pendidikan Islam ini, Departemen Agama memiliki dua tugas sekaligus. Pertama, menjalankan program pemerintah dibidang pendidikan. Kedua, menjadi representasi umat Islam dalam memperjuangkan penyelenggaraan pendidikan Islam yang lebih luas di Indonesia. Dalam hal yang terakhir ini, terlihat pada perjuangannya menggolkan aspirasi umat Islam agar pendidikan agama diajarkan di sekolah-sekolah dan usahanya untuk meningkatkan secara kuantitatif dan mengembangkan secara kualitatif madrasah dan perguruan tinggi Islam dimana didalam perguruan tinggi Islam dan di dalam pesantren para santri di ajarkan keahlian agar bisa menjadi tenaga kerja yang trampil (Purwanto, 2022).

Diantara Lembaga-lembaga yang ada adalah:

1) Pesantren. Pesantren pada dasarnya merupakan lembaga pendidikan Islam yang memiliki ciri khas khusus dalam program kurikulumnya. (Herman, 2013) Didalamnya meliputi Pendidikan ilmu agama dan mampu mewujudkan nilai keislaman dalam kehidupan kesehatan. Pesantren dibagi menjadi dua macam yaitu pesantren salaf dan pesantren khalaf. Pesantren salaf masih terikat pada tradisi lama seperti kitab klasik dan non klasikal. Sedangkan pesantren khalaf merupakan pesantren yang telah dimodernisasi yang dilihat dari segi sistem, kurikulum dan manajemen.

2) Sekolah merupakan lembaga pendidikan yang memusatkan pada pengetahuan yang dikembangkan ialah pengetahuan umum.(Usri, 2020) Adanya pendidikan formal di sekolah merupakan pengembangan pendidikan yang telah diberikan oleh orang tua terhadap anak mereka dalam keluarga. Dengan demikian bahwa proses pendidikan yang ada di sekolah merupakan bagian dari pendidikan dalam keluarga. Selain itu, kehidupan yang ada di sekolah merupakan jembatan bagi anak mereka yang menghubungkan kehidupan dalam keluarga dalam lingkup masyarakat.

3) Madrasah. Berdirinya madrasah di Indonesia begitu populer ketika pada abad ke-20.(Drajat et al., 2018) Kehadiran madrasah memberikan warna religius bagi masyarakat Islam sebagai lembaga pendidikan dilatarbelakangi dengan munculnya semangat pembaharuan lingkup pendidikan Islam di Indonesia. Madrasah sebagai wujud lembaga pendidikan yang muncul setelah pesantren dan sekolah mengadopsi sebagian sistem pendidikan pesantren dan sekolah.

4) Perguruan Tinggi Islam. Perguruan Tinggi Islam di Indonesia telah berdiri dan mulanya pertama kali Jakarta pada bulan Juli Tahun 1945 yang bernama Sekolah Tinggi Islam (STI). Berikutnya pada tahun 1946 Sekolah Tinggi Islam tersebut dipindahkan ke Yogyakarta dan pada tahun 1948 STI berubah nama menjadi Universitas dengan adanya nama Universitas Islam Indonesia (UII) yang empat fakultas Pendidikan, Agama, Ekonomi dan Hukum. Selanjutnya pada tahun 1950 Fakultas Agama Universitas Islam Indonesia menjadi negeri sehingga menjadi Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAIN)(Fahmi, n.d.).

3.7. Tantangan Utama yang Dihadapi dalam Pendidikan Islam di Indonesia Pasca Kemerdekaan

Kurangnya sumber daya, infrastruktur, dan kualitas guru secara signifikan berdampak pada efektivitas pendidikan Islam, menghambat kualitas lulusan dan hasil pendidikan secara keseluruhan (Harmita et al., 2022). Isu-isu seperti fasilitas yang tidak memadai, kapasitas staf pengajar yang terbatas, dan pendanaan yang tidak mencukupi berkontribusi terhadap tantangan yang dihadapi oleh lembaga pendidikan Islam di Indonesia dan sekitarnya (M. Ibnu Sholeh Sholeh, 2023). Upaya untuk menerapkan Total Quality Management (TQM) dalam organisasi pendidikan Islam terhambat oleh hambatan yang berkaitan dengan budaya kerja serta kinerja guru dan karyawan, yang lebih lanjut menyoroti pentingnya mengatasi kekurangan sumber daya dan infrastruktur ini (Bahri, 2022). Mengatasi tantangan ini membutuhkan langkah-langkah seperti membangun kepercayaan publik, merancang kurikulum yang selaras dengan kebutuhan masyarakat, dan meningkatkan kompetensi staf pengajar melalui integrasi teknologi dan sumber daya digital (Rosmini et al., 2024). Mengatasi isu-isu terkait sumber daya ini sangat penting untuk meningkatkan kualitas dan daya saing pendidikan Islam serta memastikan keberhasilan transformasi pengetahuan kepada siswa. Kualitas dan relevansi pendidikan Islam di Indonesia sangat dipengaruhi oleh isu-isu yang berkaitan dengan kurikulum dan pengakuan masyarakat (Susanto & Lestari, 2018). Keluhan terhadap kurikulum mencakup kepadatan, kurangnya keselarasan dengan kebutuhan siswa, dan beban yang berat bagi siswa serta guru, yang mengindikasikan perlunya perbaikan dalam konstruksi kurikulum. Lembaga pendidikan Islam di Indonesia harus selaras dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat untuk dapat maju secara efektif, karena mereka merupakan sub-sistem dari sistem pendidikan nasional (Rosyad & Maarif, 2020). Selain itu, masyarakat menuntut upaya untuk memodernisasi sistem pendidikan Islam guna meningkatkan kualitas dan relevansinya, menekankan pentingnya perubahan kurikulum yang berkelanjutan sebagai strategi sentral untuk pembangunan (Susiyani, 2017). Mengatasi masalah terkait kurikulum dan pengakuan masyarakat ini sangat penting untuk meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan Islam di Indonesia (Munir et al., 2023).

Kurangnya sumber daya, infrastruktur, dan kualitas guru mencerminkan tantangan sistemik yang mempengaruhi efektivitas pendidikan Islam di Indonesia. Masalah-masalah ini menghambat kemampuan lembaga pendidikan Islam untuk memberikan pendidikan yang berkualitas dan relevan, yang berdampak pada kualitas lulusan dan hasil pendidikan secara keseluruhan. Penerapan TQM yang terhambat menunjukkan adanya resistensi terhadap perubahan dalam budaya kerja dan manajemen kinerja di lingkungan pendidikan Islam. Kurikulum yang tidak selaras dengan kebutuhan siswa dan terlalu padat menunjukkan kurangnya adaptasi terhadap dinamika dan kebutuhan pendidikan modern. Tantangan-tantangan yang dihadapi oleh pendidikan Islam di Indonesia menunjukkan perlunya pendekatan holistik dan strategis untuk mengatasi masalah-masalah yang ada. Kurangnya sumber daya dan infrastruktur memerlukan perhatian khusus dari pemerintah dan pemangku kepentingan pendidikan untuk memastikan bahwa lembaga pendidikan Islam memiliki fasilitas dan dana yang memadai.

Kualitas guru yang rendah memerlukan upaya peningkatan kompetensi melalui pelatihan dan pengembangan profesional. Implementasi TQM yang terhambat memerlukan perubahan budaya organisasi yang lebih terbuka terhadap peningkatan kualitas dan inovasi. Kurikulum yang padat dan tidak sesuai dengan kebutuhan siswa memerlukan peninjauan dan penyesuaian yang berkelanjutan untuk memastikan relevansi dan efektivitasnya (Hidayat et al., 2024).

3.8. Prospek Masa Depan Pendidikan Islam di Indonesia dan Upaya untuk Mengatasi Tantangan Yang Dihadapi

Integrasi teknologi telah terbukti meningkatkan kualitas dan efektivitas pembelajaran dalam pendidikan Islam dengan menyediakan alat dan metode inovatif untuk proses belajar mengajar (Hartati et al., 2022). Berbagai studi telah menunjukkan dampak positif dari penggunaan media pembelajaran berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) terhadap motivasi, pemahaman, dan perolehan pengetahuan siswa dalam pendidikan Islam (Laraphaty et al., 2021).

Pemanfaatan teknologi dalam pendidikan agama Islam ditekankan sebagai kebutuhan mendesak untuk mengikuti inovasi disruptif di era digital, guna memastikan lingkungan belajar yang dinamis dan menarik yang dapat memikat perhatian siswa serta meningkatkan kualitas pendidikan (Kurniawan, 2016). Selain itu, penguasaan manajemen kelas online dan pemanfaatan platform seperti YouTube, Zoom, Google Meet, dan Google Classroom diidentifikasi sebagai faktor penting dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran daring, terutama dalam mata pelajaran seperti matematika, kimia, dan fisika. Hal ini menunjukkan bahwa integrasi teknologi dalam pendidikan Islam bukan hanya meningkatkan kualitas pembelajaran tetapi juga relevansinya dalam konteks pendidikan modern (Romadanti, 2023).

Kerja sama internasional dapat secara signifikan meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan Islam di Indonesia melalui dorongan praktik benchmarking (Arifin, 2016). Berkolaborasi dengan mitra internasional dapat membantu mengembangkan benchmarking dalam kurikulum pendidikan Islam, menyelaraskannya dengan standar global untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan daya saing dalam skala global. Selain itu, kerjasama internasional dapat membawa beragam perspektif dan praktik terbaik untuk mengatasi berbagai krisis dalam pendidikan di Indonesia, termasuk isu kualitas, relevansi, elitisme, dan manajemen (Hidayat et al., 2024).

3.9. Tujuan Pendidikan Islam Pasca Kemerdekaan

Tujuan utama dari Pendidikan dan Pengajaran adalah membentuk individu yang mampu dan bertanggung jawab, yang dapat menjadi warga negara yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, dan mampu berdiri sendiri sebagai warga Pancasila yang sejati. Tujuan ini mengarahkan upaya pendidikan untuk berkontribusi pada proses pembangunan yang sesuai dengan cita-cita kemerdekaan yang telah diperjuangkan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 4 tahun 1950 Republik Indonesia. Lebih lanjut, Pendidikan dan Pengajaran bertujuan untuk membentuk individu yang memiliki moralitas yang baik, memiliki keterampilan, bersifat demokratis, serta bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat dan tanah air dengan membentuk Karakter Beragama dan Kebangsaan. Salah satu tujuan penting dari Pendidikan Islam Pasca Merdeka adalah membentuk karakter siswa yang kuat dalam aspek keagamaan dan kebangsaan. Pendidikan Islam bertujuan untuk melahirkan generasi muda yang memiliki identitas keagamaan yang kuat dan menjadi warga negara yang sadar akan nilai-nilai Pancasila (Hanafi, 2017).

Meningkatkan Kualitas Pendidikan Islam: Dengan meraih kemerdekaan Pendidikan Islam memiliki kesempatan untuk meningkatkan kualitasnya. Tujuan ini mencakup peningkatan mutu tenaga pendidik, kurikulum yang lebih sesuai, dan metode pengajaran yang lebih efektif dalam menyampaikan ajaran Islam, Mendorong Toleransi Antar Umat Beragama: Pendidikan Islam juga bertujuan untuk membentuk sikap toleransi dan saling pengertian antara umat Islam dan pemeluk agama lain. Pendidikan harus mendorong kerukunan antarumat beragama dan menghindari sikap radikalisme, Menghasilkan Generasi yang Berkontribusi Positif: Pendidikan Islam harus memberikan kontribusi positif bagi perkembangan masyarakat dan negara. Tujuan ini mencakup persiapan siswa untuk menjadi pemimpin, pekerja berkompeten, dan warga negara yang bertanggung jawab. Pengembangan Penelitian dan Ilmu Pengetahuan: Pendidikan Islam juga harus menjadi pendorong pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian dalam konteks Islam. Mendorong siswa untuk mengejar studi lebih lanjut dan berkontribusi pada perkembangan pengetahuan Islam (Nilawati & Achruh, 2023).

3.10 Kondisi Masyarakat dan Pendidikan pada Masa Kemerdekaan

Selama masa penjajahan oleh Belanda dan Jepang, perjalanan pendidikan Islam ditinggalkan dengan penderitaan, penderitaan mental, dan keadaan psikologis yang rapuh. Oleh karena itu, para tokoh Muslim terdorong untuk melakukan reformasi dalam pendidikan Islam dengan mendirikan berbagai lembaga seperti pondok pesantren, madrasah, majlis taklim, dan sebagainya. Di lembaga-lembaga tersebut, mereka mempelajari ilmu agama dan ilmu umum, terutama ilmu kebangsaan. Dari lembaga-lembaga ini, lahir para tokoh Muslim yang memainkan peran penting dalam mewujudkan kemerdekaan dan mempertahankan ajaran Islam. Selama masa penjajahan, akses pendidikan bagi anak-anak Indonesia sangat terbatas. Hanya sedikit anak yang memiliki kesempatan untuk menghadiri sekolah, dan sebagai akibatnya, sebagian besar penduduk Indonesia masih belum bisa membaca dan menulis. Oleh karena itu, setelah Proklamasi Kemerdekaan, pemerintah menunjuk Ki Hajar Dewantara sebagai Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan (PP dan K). (Kehidupan Masyarakat Indonesia pada Masa Kemerdekaan (kompas.com), diakses pada tanggal 26 Oktober 2023).

Pasca kemerdekaan hingga tahun 1965, sistem pendidikan banyak dipengaruhi oleh sistem pendidikan Belanda, yang menekankan pada pengembangan kemampuan masyarakat pribumi yang telah diadopsi dari pendidikan Barat. Oleh karena itu, sistem pendidikan semacam itu diteruskan oleh rakyat Indonesia setelah merdeka. Pemerintah Indonesia pun menerapkan pendidikan yang berakar pada budaya bangsa sendiri, dengan fokus pada menciptakan warga negara yang bersifat sosial, demokratis, kompeten, bertanggung jawab, memiliki semangat patriotisme, serta siap memberikan kontribusi dalam hal tenaga dan pemikiran untuk negara (Nilawati & Achruh, 2023).

4. KESIMPULAN

Sesudah kemerdekaan Indonesia menjadi periode penting dalam sejarah Pendidikan Islam di negara ini. Selama masa penjajahan Belanda dan Jepang, pendidikan Islam mengalami penderitaan dan kesulitan. Namun, setelah Indonesia merdeka, muncul semangat reformasi dalam pendidikan Islam. Berbagai lembaga seperti pondok pesantren, madrasah, dan majlis taklim didirikan dengan tujuan membentuk karakter yang berlandaskan agama dan kebangsaan, meningkatkan mutu pendidikan Islam, mendorong toleransi antar umat beragama, menciptakan generasi yang berkontribusi positif, dan mengembangkan penelitian dalam konteks Islam (Nilawati & Achruh, 2023).

Peran lembaga pendidikan pondok pesantren sangat besar bagi terwujudnya tujuan pendidikan di Indonesia antara lain mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya yang memiliki ilmu pengetahuan dan berakhlak mulia. Hal ini dapat dipahami karena proses pembinaan santri di dalam pondok pesantren berlangsung secara simultan selama 24 jam dari pagi sampai malam. Para santri tidak hanya diberikan pengetahuan tetapi sekaligus mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan pondok pesantren (Purwanto, 2022).

Dalam perspektif peneliti bahwa adanya perubahan dari setiap kebijakan yang dibuat oleh masing-masing era, itu memiliki beberapa kekurangan dan kelebihan di setiap liniya, tak terkecuali era modern. Maka dari itu, unsur pendidikan mulai beragam, dari yang awalnya pendidikan hanya diperuntukkan untuk kepentingan pengetahuan semata, namun kini pendidikan juga mampu menjadi komoditi dalam memperdayakan masyarakat dan memang harus berkembang sesuai zaman. Hal itu dikarenakan pendidikan merupakan pola asuh yang terpenting, oleh karena itu pendidikan sekarang tidak hanya bertumpu pada sekolah negeri, swasta atau pendidikan informal, melainkan juga ada pendidikan yang sifatnya lebih beragam. Semua itu dibutuhkan untuk menunjang literasi pendidikan dalam Islam yang juga mengalami pembaharuan dan perkembangan, sehingga setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah memiliki signifikansi dalam kehidupan masyarakat secara luas (Musadad, 2021). Dan dapat disimpulkan bahwa perkembangan pendidikan Islam di Indonesia mengalami dinamika signifikan seiring dengan perubahan politik, sosial, dan kebijakan pemerintah sejak tahun 1945 hingga kini (Fuadi, 2025).

Berdasarkan evaluasi terhadap perkembangan pendidikan Islam di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa terdapat upaya yang signifikan untuk meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan melalui integrasi teknologi, perubahan kebijakan, dan kerjasama internasional. Namun, masih terdapat beberapa kesenjangan yang perlu diperhatikan untuk memastikan efektivitas dan keberlanjutan upaya perbaikan tersebut. Salah satunya adalah masalah sumber daya, infrastruktur, dan kualitas guru yang masih menjadi hambatan serius dalam meningkatkan efektivitas pendidikan Islam.

Selain itu, isu terkait kurikulum yang kurang relevan dengan kebutuhan masyarakat serta pengakuan masyarakat terhadap pendidikan Islam juga merupakan tantangan yang perlu diatasi (Hidayat et al., 2024).

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, N., Kusmiran, L., Syahril, R., Jafar, K., & Alwi, M. (2025). *Sejarah Peradaban Islam Indonesia Pra Kemerdekaan*. 5(1), 1147–1153.
- Fahmi, F. (n.d.). *Orientasi perkembangan pendidikan islam pasca proklamasi*.
- Fuadi, S. (2025). *Islam Dan Pendidikan Di Indonesia Pasca Kemerdekaan : Analisis Terhadap Sistem Dan*. 2(4), 1008–1014.
- Hidayat, R., Nisa, K., Zaini, M., Safitri, D., & Astini, B. I. (2024). *Realita Pendidikan Islam Di Indonesia Pasca Dan Prospek Masa Depan*. 4(2), 188–204.
- Musadad, A. J. (2021). *Dinamika Pendidikan Islam Pasca Kemerdekaan di Indonesia*. 20(1), 1–23.
- Nilawati, S., & Achruh, A. (2023). *Pendidikan Islam di Indonesia Pasca Kemerdekaan*. 2(1), 108–115. <https://doi.org/10.58540/pijar.v2i1.492>
- Purwanto, E. (2022). *Pendidikan islam di indonesia setelah merdeka*. 2(1), 88–96.
- Susilawati, E., & Kurnia, H. (2024). *Perkembangan Agama Islam di Indonesia Pasca Kemerdekaan*. 1(2), 87–103.
- Volume, J. H., Sejarah, P. S., Islam, K., Sultan, I. A. I., Syafiuddin, M., Islam, A., Indonesia, D., Islam, P., Indonesia, S., Kunci, K., & Islam, P. (2015). *Perkembangan Islam Di Indonesia Pasca Kemerdekaan Beti Yanuri Posha, S.Pd., M.Hum*. 3.
- Yustisia, R., & Komariah, N. S. (2025). *Konsep Dasar dan Dinamika Sejarah Pendidikan Islam di Nusantara*. 9(02), 315–329.